



Efek Penerapan Good Corporate Governance terhadap Keberhasilan Sistem Pengendalian Internal dalam Mencegah Fraud

Adiendda Alifah Mutiara Wardah

Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia

Pupung Purnamasari

Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia

Email:

adienddaam28@gmail.com

pupung@unisba.ac.id

Korespondensi penulis : adienddaam28@gmail.com

Abstract

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) in Indonesia is often not matched by an effective internal audit system, resulting in increased fraud cases in various organizations, including financial institutions. Although many companies have implemented GCG principles, many fraud cases still occur due to weak oversight and a lack of integration between GCG and internal control systems. This study aims to examine the influence of GCG on the performance of internal control systems in preventing fraud, emphasizing the importance of transparency, accountability, and management oversight. This article was written using a qualitative research method with a library research approach, namely reviewing literature from scientific journals and other online sources such as Google Scholar to analyze the relationships between variables. This study utilized relevant previous literature studies regarding the influence of GCG implementation on the effectiveness of internal control in preventing fraud. The results indicate that good integration between GCG and internal control can strengthen fraud prevention mechanisms and increase public trust in the organization.

Keywords: *Good Corporate Governance, Internal Control, Fraud Prevention, Transparency, Accountability*

Abstrak

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di Indonesia seringkali tidak diimbangi dengan efektivitas sistem audit internal yang berdampak pada meningkatnya kasus kecurangan di berbagai organisasi, termasuk lembaga keuangan. Meskipun banyak perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip GCG, namun masih banyak kejadian kecurangan yang terjadi akibat lemahnya pengawasan dan kurangnya integrasi antara GCG dengan sistem pengendalian internal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh GCG terhadap kinerja sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya kecurangan, dengan menitikberatkan pada pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan manajemen. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan

pendekatan library research, yaitu dengan mengkaji literatur dari jurnal ilmiah dan sumber daring lainnya seperti Google Scholar untuk menganalisis hubungan antar variabel. Penelitian ini menggunakan studi literatur terdahulu yang relevan mengenai pengaruh penerapan GCG terhadap efektivitas pengendalian internal dalam mencegah terjadinya kecurangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi yang baik antara GCG dengan pengendalian internal dapat memperkuat mekanisme pencegahan kecurangan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi.

Kata Kunci : Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Pengendalian Internal, Pencegahan Kecurangan, Transparansi, Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di Indonesia sering kali tidak diimbangi dengan efektivitas sistem audit internal yang berdampak pada maraknya kasus kecurangan (*fraud*) di berbagai jenis organisasi, baik lembaga keuangan publik, swasta, maupun lembaga keuangan syariah. Kecurangan ini tidak hanya berdampak pada keuangan, tetapi juga merusak reputasi organisasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga yang bersangkutan (Nova Sucisari 2019) meskipun banyak perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan prinsip-prinsip GCG, penyebab utama maraknya insiden *fraud* adalah masih kurangnya penerapan sistem audit internal.

Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara teori dan praktik di lapangan. Secara teoritis, GCG bertujuan untuk menciptakan struktur tata kelola yang adil, akuntabel, dan transparan. Namun, pada kenyataannya, banyak organisasi yang belum mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik, terutama dalam hal penguatan sistem internal. (Harahap, 2024), sejumlah faktor, antara lain komite manajemen yang kurang efektif, pengawasan yang kurang efektif, serta praktik kerja yang kurang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, menjadi penghambat penerapan GCG di Indonesia.

Penelitian sebelumnya menemukan bahwa, meskipun beberapa organisasi memiliki praktik GCG yang baik, praktik tersebut tetap gagal karena kurangnya integrasi antara tata kelola dan elemen kunci pengembangan internal. (Harahap, 2024) menyatakan bahwa sistem audit internal yang efektif dapat meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan. Hal ini menyoroti perlunya penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang memengaruhi hubungan antara GCG dan proses internal, serta pencarian metode yang lebih efektif untuk mengurangi risiko kecurangan melalui penggunaan kedua aspek tersebut.

Penelitian (Sitti Fitratul Jannah, 2016) menguatkan hal tersebut melalui temuannya bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG berpengaruh signifikan dan positif terhadap pencegahan fraud di

lingkungan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Surabaya. Penerapan prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan independensi terbukti mampu menurunkan potensi terjadinya kecurangan. Namun, penelitian ini tidak mengeksplorasi bagaimana GCG dapat memengaruhi efektivitas sistem pengendalian internal secara lebih mendalam.

Lebih lanjut, studi oleh (Nugroho & Afifi, 2022) juga memperkuat hubungan antara GCG dan pencegahan fraud, serta menambahkan bahwa pengendalian internal memiliki peran penting sebagai variabel yang dapat meningkatkan kualitas penerapan GCG itu sendiri. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa efektivitas pencegahan fraud dapat ditingkatkan melalui sinergi antara dua aspek utama yaitu pengendalian internal dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Namun demikian, studi tersebut lebih menekankan hubungan langsung antarkomponen tersebut tanpa mengidentifikasi mekanisme perantara atau penguat di dalam sistem audit internal.

Hingga awal tahun 2024, IRS telah menyelidiki lebih dari 1.600 kasus penipuan yang berkaitan dengan dana bantuan COVID-19, dengan hasil penyelidikan yang mencapai \$8,9 miliar. Mayoritas kasus ini berkaitan dengan penyalahgunaan dana yang seharusnya disediakan untuk membantu pekerja dan bisnis kecil. Dari investigasi tersebut, sebanyak 795 orang didakwa, dan lebih dari 370 orang dijatuhi hukuman penjara rata-rata 34 bulan. Temuan ini menunjukkan bahwa program bantuan besar seperti CARES Act tidak diawasi dengan baik sehingga menimbulkan penipuan (IRS, 2024).

Dalam situasi seperti ini, teori pengendalian internal yang berkaitan dengan kerangka kerja Komite Organisasi *Sponsor Treadway Commission* (COSO) menjadi relevan. COSO menggarisbawahi lima bagian utama pengendalian yang efektif: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Pengendalian internal yang efektif menurut COSO tidak hanya meningkatkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), tetapi juga meningkatkan risiko penipuan dengan membangun sistem deteksi dini dan mitigasi risiko.

Selain itu, menurut teori tiga segi penipuan yang dikembangkan oleh Donald R. Cressey, penipuan terjadi ketika ada tiga komponen utama: tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Melemahnya pengawasan program bantuan dalam kasus ini memungkinkan pelaku melakukan penipuan. Penipuan dapat dihindari dengan meningkatkan pengendalian internal melalui pendekatan COSO.

Studi sebelumnya menunjukkan peningkatan kasus penipuan di lembaga keuangan karena penerapan GCG yang buruk. Misalnya, (Lestari et al., 2021) menemukan bahwa kualitas sistem informasi akuntansi manajemen (SIAM) memengaruhi seberapa efektif GCG dan pengendalian

internal. Namun, tidak banyak penelitian yang secara langsung mengaitkan penerapan prinsip-prinsip GCG dengan meningkatkan sistem pengendalian internal untuk mencegah *Fraud*.

Ada banyak faktor yang dapat dianalisis dalam mencegah kecurangan (*fraud*) untuk mengetahui sejauh mana pengaruhnya terhadap keberhasilan pencegahannya. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dampak *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja sistem pengendalian internal dalam mencegah penipuan karena GCG merupakan komponen penting yang menjadi perhatian utama. Dalam artikel ini, kami melihat hubungan antara komponen GCG seperti transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan manajemen, dan bagaimana implementasi yang efektif dari komponen-komponen ini dapat memperkuat mekanisme pengendalian internal organisasi untuk mengurangi risiko penipuan.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara elemen-elemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) seperti transparansi, akuntabilitas, dan pengawas dalam penerapan GCG di Indonesia dan bagaimana hal itu berdampak pada kemampuan sistem audit internal untuk mencegah kecurangan (*fraud*) di berbagai organisasi.

KAJIAN TEORI

Kajian menunjukkan bahwa elemen-elemen utama dalam *Good Corporate Governance* (GCG), seperti transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan manajemen, merupakan komponen fundamental dalam membangun sistem pengendalian internal yang kuat dan efektif, yang pada akhirnya berperan besar dalam mencegah terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*) dalam suatu organisasi. Prinsip-prinsip GCG tidak hanya berfungsi sebagai panduan normatif dalam pengelolaan organisasi, tetapi juga sebagai landasan etis dan struktural yang mampu membentuk budaya organisasi yang sehat. Ketika prinsip-prinsip tersebut berhasil diinternalisasi ke dalam setiap proses bisnis dan perilaku organisasi, maka kemungkinan terjadinya *fraud* dapat ditekan secara signifikan. Penelitian oleh (Fadilah et al., 2019) menegaskan bahwa ketika prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan secara menyeluruh dalam organisasi, maka lingkungan kerja yang terbentuk menjadi lebih aman, terpercaya, serta memiliki tingkat integritas yang tinggi.

Transparansi memberikan ruang bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengetahui dan memahami proses pengambilan keputusan serta aliran informasi dalam organisasi. Ini menciptakan kepercayaan dan menutup celah kemungkinan penyimpangan yang mungkin terjadi karena tertutupnya akses informasi. Akuntabilitas, di sisi lain, menuntut pertanggungjawaban dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses organisasi atas segala keputusan dan tindakan yang diambil. Tanpa

akuntabilitas yang tegas, tindakan fraud akan lebih mudah dilakukan karena tidak adanya konsekuensi atau sanksi yang jelas. Sementara itu, pengawasan manajemen memastikan bahwa seluruh kebijakan dan prosedur berjalan sesuai dengan prinsip GCG yang telah ditetapkan, serta menjadi penghubung antara perencanaan strategis dan pelaksanaan operasional yang bertanggung jawab.

Untuk mendukung implementasi GCG yang efektif, diperlukan sistem pengendalian internal yang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga substantif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, kerangka kerja *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) menjadi sangat relevan. Menurut COSO, terdapat lima komponen utama yang wajib ada dalam setiap sistem pengendalian internal yang baik, yaitu:

1. lingkungan pengendalian (*control environment*),
2. penilaian risiko (*risk assessment*),
3. aktivitas pengendalian (*control activities*),
4. informasi dan komunikasi (*information and communication*),
5. pemantauan (*monitoring*).

Kelima komponen ini bersifat saling terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing memiliki peran yang berbeda namun saling mendukung dalam menciptakan sistem pengendalian yang efektif.

Lingkungan pengendalian menjadi pondasi awal yang mencerminkan komitmen organisasi terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Hal ini meliputi sikap pimpinan, struktur organisasi, kebijakan sumber daya manusia, dan budaya kerja. Bila lingkungan pengendalian ini lemah, maka semua komponen lainnya juga akan kehilangan kekuatannya. Penilaian risiko membantu organisasi untuk mengenali dan mengevaluasi kemungkinan terjadinya kejadian-kejadian yang bisa menghambat pencapaian tujuan organisasi. Ini penting untuk merumuskan langkah-langkah pengendalian yang relevan dan efisien. Selanjutnya, aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk menangani risiko yang telah diidentifikasi. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa informasi terkait pengendalian tersebar secara menyeluruh di seluruh lini organisasi. Terakhir, pemantauan dilakukan untuk menilai efektivitas keseluruhan sistem, baik secara berkala maupun berkelanjutan.

Seperti yang dijelaskan oleh (Vallabhaneni, 2024), tanpa penerapan yang konsisten dari kelima komponen COSO tersebut, maka sistem pengendalian internal akan menjadi lemah dan tidak mampu memberikan perlindungan yang maksimal terhadap risiko kecurangan. Sistem yang tidak terpantau secara aktif juga akan mengalami stagnasi dan tertinggal dalam merespons dinamika lingkungan

bisnis yang terus berubah. Oleh sebab itu, proses pencegahan kecurangan akan menjadi tidak efektif jika pengendalian internal tidak dirancang dan dijalankan dengan baik. Dalam hal ini, evaluasi dan pembaruan sistem pengendalian harus menjadi bagian dari agenda manajemen secara berkala, bukan sekadar program yang dilaksanakan saat terjadi masalah atau audit tahunan. Dalam jurnal (Purnamasari, n.d.) juga mengingatkan bahwa efektivitas pengendalian internal harus terus diukur dan disesuaikan dengan kondisi terbaru agar tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan risiko.

Menurut kerangka COSO, lima komponen utama harus ada dalam sistem pengendalian internal yang baik: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, tindakan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Komponen ini dirancang untuk melindungi aset, menjaga kepatuhan terhadap peraturan, dan memastikan tercapainya tujuan organisasi secara efektif (Vallabhaneni, 2024). Proses pencegahan kecurangan akan menjadi kurang efektif jika pengendalian tidak berfungsi dengan baik. sehingga pemimpin organisasi harus mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengendalian secara teratur (Purnamasari, n.d.)

Dalam upaya mewujudkan GCG dan pengendalian internal yang berjalan secara sinergis, peran pimpinan organisasi menjadi sangat krusial. Pemimpin tidak hanya bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan strategis, tetapi juga harus memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar diimplementasikan hingga ke tingkat operasional. Peran pemimpin sangat penting dalam merencanakan, mengevaluasi, dan memastikan efektivitas sistem secara berkelanjutan dalam implementasi GCG dan pengendalian internal. Pelatihan integritas dan etika kerja bagi auditor dan karyawan juga sangat penting untuk keberhasilan kedua komponen tersebut. Metode holistik dapat membantu perusahaan memperkuat sistem pengendalian internalnya untuk mengurangi risiko penipuan (Fadilah et al., 2019)

Metode yang bersifat holistik sangat disarankan dalam membangun sistem pencegahan fraud. Pendekatan ini mencakup tidak hanya perangkat teknis seperti regulasi dan prosedur, tetapi juga pembentukan budaya organisasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan teknologi yang mendukung deteksi dini atas potensi kecurangan. Dalam konteks digitalisasi saat ini, teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mengotomatisasi sistem pengendalian dan meningkatkan transparansi. Misalnya, penggunaan sistem pelaporan berbasis elektronik, audit berbasis data (*data analytics*), serta dashboard pengawasan real-time dapat meningkatkan efektivitas pengendalian secara signifikan.

Penting pula untuk memperhatikan aspek pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi auditor internal dan seluruh staf yang terlibat dalam proses pengendalian. Pelatihan ini tidak hanya berisi materi teknis, tetapi juga penanaman nilai-nilai moral, tanggung jawab sosial, dan budaya pelaporan yang mendorong keterbukaan. Selain itu, sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang terpercaya dan aman juga perlu disediakan sebagai saluran komunikasi vertikal yang memungkinkan pelaporan fraud dilakukan tanpa rasa takut akan pembalasan.

Dalam jangka panjang, organisasi yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip GCG secara utuh ke dalam struktur pengendalian internalnya akan memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap ancaman fraud. Mereka juga akan mendapatkan kepercayaan lebih tinggi dari publik, investor, regulator, dan mitra kerja, karena sistem tata kelola yang baik mencerminkan integritas dan komitmen perusahaan terhadap prinsip keadilan dan kepatuhan hukum. Oleh sebab itu, pengendalian internal bukan hanya menjadi alat administratif, melainkan strategi penting dalam membangun organisasi yang sehat dan berkelanjutan.

METODE

Artikel ilmiah ini ditulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*). Metode ini digunakan melalui pengkajian teori dan analisis hubungan atau pengaruh antar variabel dari platform daring seperti Google Scholar dan media online lainnya. Studi sebelumnya tentang pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap keberhasilan sistem pengendalian internal dalam mencegah fraud terhadap keberhasilan sistem pengendalian internal dalam mencegah fraud dimasukkan ke dalam populasi penelitian ini.

Penelitian ini bersifat eksploratif dan menggunakan asumsi metodologis untuk mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam tentang hubungan antar variabel yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian literatur dan teori yang telah dianalisis, penelitian ini menemukan bahwa pencegahan fraud dalam organisasi sangat bergantung pada dua faktor utama, yaitu penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan efektivitas sistem pengendalian internal. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu dan teori yang mendasari pentingnya tata kelola yang baik serta kontrol internal yang kuat dalam membangun organisasi yang transparan dan bebas dari praktik penipuan.

1. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh terhadap pencegahan fraud

Penerapan GCG terbukti memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan organisasi yang kondusif terhadap integritas dan transparansi. Prinsip-prinsip utama GCG seperti tanggung jawab, independensi, dan keadilan membantu menciptakan lingkungan yang meminimalkan risiko penipuan. membantu menciptakan sistem manajerial yang mampu mendeteksi serta mencegah potensi tindakan fraud sejak dini. Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten lebih mampu meminimalkan risiko fraud, karena memiliki struktur pengawasan dan pengambilan keputusan yang jelas.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Fitriana et al., 2024) yang menyatakan bahwa penerapan GCG secara menyeluruh dapat memperkuat pengendalian internal perusahaan dan berdampak langsung terhadap pencegahan fraud. Dalam konteks ini, peran dewan komisaris dan komite audit sebagai bagian dari struktur GCG menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa praktik operasional organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Namun, hanya menerapkan GCG tanpa adanya integrasi dengan sistem pengendalian internal yang efektif belum cukup untuk mencegah fraud secara menyeluruh. Seperti yang dinyatakan oleh Dengan kata lain, keberhasilan GCG dalam mencegah kecurangan sangat bergantung pada integrasi yang kuat dengan sistem pengendalian internal. Tanpa adanya dukungan pengawasan internal yang memadai, prinsip-prinsip GCG berisiko hanya menjadi formalitas administratif tanpa implementasi yang efektif di lapangan. (Agus Santoso et al., 2024)

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang menggabungkan penerapan GCG dengan sistem pengendalian internal yang terstruktur menunjukkan hasil yang lebih signifikan dalam pencegahan fraud. Temuan ini juga didukung oleh teori *fraud triangle* yang dikembangkan oleh Donald R. Cressey, yang menyatakan bahwa penipuan terjadi karena adanya tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Penerapan GCG yang efektif dapat mengurangi aspek peluang melalui peningkatan pengawasan dan transparansi, serta mengurangi aspek rasionalisasi dengan membangun budaya kerja yang berlandaskan etika dan tanggung jawab.

Manajemen perusahaan yang baik sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mencegah penipuan. Perusahaan dapat membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan dan mengurangi risiko kecurangan dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG seperti

transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Pengendalian internal yang kuat juga sangat penting untuk deteksi dan pencegahan risiko, membantu perusahaan menemukan potensi risiko sebelum menjadi masalah yang lebih serius. Oleh karena itu, integrasi GCG dan pengendalian internal tidak hanya meningkatkan kinerja bisnis tetapi juga menciptakan budaya di dalam perusahaan yang mencegah kesalahan.(Nadia et al., n.d.)

Selain itu, temuan ini diperkuat oleh hasil studi (Nadia et al., n.d.), yang menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen kunci dari GCG yang dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan serta memperkuat sistem pengendalian internal perusahaan. Dengan penerapan GCG yang konsisten, perusahaan tidak hanya mampu meminimalkan risiko fraud, tetapi juga dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik.

2. Pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud

Pengendalian internal merupakan sistem yang dirancang untuk menyediakan jaminan memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi, termasuk keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, serta efektivitas dan efisiensi operasional. Dalam konteks pencegahan fraud, sistem pengendalian internal yang efektif mencakup mekanisme yang dapat mendeteksi serta mencegah penyimpangan sejak awal.

Penelitian ini menemukan bahwa pengendalian internal yang baik memiliki korelasi positif dengan keberhasilan organisasi dalam mencegah fraud. Hal ini terlihat dari penerapan prosedur dan kebijakan yang sistematis dalam aktivitas keuangan dan operasional perusahaan, yang memungkinkan manajemen untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Sebagaimana diungkapkan oleh (Purnamasari, n.d.) pemantauan yang efektif merupakan salah satu komponen penting dalam kerangka kerja COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), yang merupakan referensi utama dalam pengendalian internal.

Kerangka COSO mencakup lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Temuan dalam artikel ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan komponen COSO secara terintegrasi lebih berhasil dalam membangun sistem pengendalian yang mampu mencegah fraud. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian (Vallabhaneni, 2024) yang menunjukkan bahwa penggunaan kerangka COSO dapat membantu perusahaan dalam menutup celah pengendalian dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Dukungan manajemen dalam penerapan pengendalian internal juga menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas sistem tersebut. Temuan ini sejalan dengan hasil studi (Suci Rahmadani & Sugiarto, n.d.) yang menyatakan bahwa komitmen manajemen terhadap GCG dan

pengendalian internal secara langsung berdampak pada peningkatan kemampuan auditor internal dalam mendeteksi tindakan fraud. Dalam hal ini, pelatihan integritas dan etika kerja juga menjadi bagian tak terpisahkan dari penguatan sistem pengendalian internal.

Pengendalian internal yang efektif mencakup prosedur dan kebijakan yang dirancang untuk mengawasi aktivitas keuangan dan operasional perusahaan. Hal ini memungkinkan manajemen untuk memantau dan mengevaluasi kinerja secara berkelanjutan, serta memberikan umpan balik yang diperlukan untuk perbaikan. Penelitian ini juga mencatat bahwa keberhasilan dalam pencegahan kecurangan sangat bergantung pada komitmen manajemen untuk menerapkan kebijakan yang mendukung GCG dan pengendalian internal. Dengan adanya dukungan dari manajemen, auditor internal dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih baik, sehingga meningkatkan kemungkinan deteksi dini terhadap tindakan *fraud*. Oleh karena itu, kombinasi antara pengendalian internal yang baik dan penerapan GCG secara konsisten menjadi sangat penting dalam membangun sistem pencegahan kecurangan yang efektif di perusahaan. (Nadia et al., n.d.)

Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang diterapkan dalam GCG yang efektif meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan memperkuat sistem pengendalian internal, yang berfungsi sebagai pertahanan pertama terhadap kecurangan. Pengendalian internal yang baik membantu perusahaan mengurangi kerugian finansial dan reputasi dengan mendeteksi *fraud* sejak dini. Ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa GCG dan pengendalian internal yang kuat bekerja sama dengan baik untuk mencegah kecurangan di berbagai industri.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya sinergi antara pengendalian internal dan GCG. Kombinasi keduanya menciptakan sistem pertahanan berlapis yang mampu menutup celah peluang bagi pelaku fraud. Dengan kata lain, GCG menyediakan kerangka kebijakan dan tata kelola, sementara pengendalian internal menyediakan mekanisme operasional yang melaksanakan kebijakan tersebut secara efektif.

3. Perbandingan dengan Penelitian Relevan

Agar temuan dalam artikel ini memiliki validitas akademik yang kuat, maka dilakukan perbandingan terhadap sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki relevansi langsung dengan tema

pencegahan fraud melalui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan sistem pengendalian internal. Hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa temuan artikel konsisten dengan literatur yang

sudah ada, namun juga menawarkan kontribusi berupa integrasi sudut pandang dan fokus kajian yang lebih menyeluruh.

Pertama, penelitian oleh (Fitriana et al., 2024) yang berjudul “*Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud pada PT. Barru Barakah*” menemukan bahwa prinsip-prinsip GCG, khususnya transparansi dan akuntabilitas, sangat signifikan dalam mengurangi potensi penipuan. Fitriana dan timnya menekankan bahwa GCG bukan hanya perangkat formal, tetapi harus dijalankan secara substansial agar mampu membentuk budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika.

Kesamaan utama dengan artikel ini adalah pada penekanan bahwa tanpa adanya sistem pengendalian internal yang memadai, prinsip GCG hanya akan menjadi simbolis. Namun, perbedaan mencoloknya adalah bahwa penelitian Fitriana terbatas pada satu objek perusahaan tertentu, sedangkan artikel ini mengusulkan temuan berbasis review literatur lintas industri sehingga cakupannya lebih luas dan aplikatif.

Kedua, (Suci Rahmadani & Sugiarto, n.d.) dalam penelitiannya yang fokus pada pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa kombinasi GCG dan pengendalian internal dapat mengurangi penyalahgunaan dana publik. Penelitian mereka menyoroti bahwa pengendalian internal menjadi lebih efektif ketika manajemen desa memiliki komitmen pada prinsip-prinsip GCG.

Temuan ini paralel dengan hasil dalam artikel ini yang menunjukkan bahwa pengaruh GCG terhadap fraud prevention akan lebih kuat apabila didukung oleh perangkat pengawasan internal yang berjalan optimal. Meskipun ruang lingkupnya berbeda (pemerintahan desa vs. korporasi), namun kontribusi kajiannya memperkuat relevansi integrasi GCG dan pengendalian internal dalam konteks sektor publik.

Ketiga, (Nova Sucisari, 2019) meneliti keterkaitan antara pengendalian internal dan GCG pada PT. Budi Starch and Sweeteners. Penelitian ini menyoroti bahwa pengendalian internal bukan sekadar bagian dari pelaporan keuangan, melainkan sebagai sistem pertahanan utama terhadap fraud.

Nova menyatakan bahwa dalam praktiknya, keberhasilan GCG sangat dipengaruhi oleh bagaimana sistem pengendalian dirancang dan dijalankan. Artikel ini memperluas temuan Nova dengan menyatakan bahwa pengendalian internal yang baik tidak hanya mendukung GCG, tetapi juga harus dikembangkan dalam konteks COSO agar mampu menjawab tantangan kompleksitas bisnis saat ini.

Selanjutnya, (Nugroho & Afifi, 2022) melakukan penelitian mengenai pengaruh GCG dan pengendalian internal terhadap fraud prevention dan menyimpulkan bahwa keduanya memiliki hubungan sinergis yang saling menguatkan. GCG bertindak sebagai arah kebijakan makro dan budaya

organisasi, sedangkan pengendalian internal bertugas sebagai pelaksana teknis dan mekanisme evaluasi di lapangan.

Artikel ini menyepakati posisi tersebut, namun memberikan penekanan tambahan berupa pentingnya pengawasan manajemen sebagai elemen kunci dalam keberhasilan integrasi keduanya. Hal ini menyoroti bahwa tidak cukup hanya membangun sistem, tetapi juga membutuhkan kepemimpinan yang berkomitmen dan bertanggung jawab.

Sementara itu, (Purnamasari, n.d.) mengkaji pengaruh religiositas dan kompetensi auditor forensik terhadap pencegahan fraud di sektor publik. Penelitiannya menyatakan bahwa kompetensi dan nilai pribadi auditor sangat memengaruhi efektivitas pengendalian. Meski fokus utama Purnamasari berbeda, artikel ini tetap mengadopsi pandangan bahwa keberhasilan pengendalian internal sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, terutama dalam proses audit internal.

Dengan demikian, artikel ini mengusulkan bahwa integrasi antara GCG dan pengendalian internal juga harus diperkuat dengan pelatihan dan pengembangan etika profesional karyawan, khususnya auditor internal.

(Miranda Anzasmara Pasaribu, 2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat implementasi GCG dan pengendalian internal yang tinggi cenderung memiliki performa yang lebih baik, bukan hanya dalam aspek keuangan, tetapi juga dalam membangun kepercayaan investor.

Dalam konteks ini, artikel ini menambahkan bahwa kepercayaan publik bukan hanya berdampak pada citra perusahaan, tetapi juga pada keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Dengan demikian, pencegahan fraud tidak hanya merupakan tanggung jawab kepatuhan, tetapi juga bagian dari strategi keberlanjutan organisasi.

Artikel ini juga memperluas wacana dengan menggunakan pendekatan teoritis yang mencakup *COSO framework* dan *fraud triangle theory*. COSO memberikan panduan tentang bagaimana sistem pengendalian internal harus dibangun dan diimplementasikan dalam organisasi modern, sedangkan teori *fraud triangle* menjelaskan secara psikologis dan struktural bagaimana penipuan bisa terjadi.

Perpaduan teori ini belum banyak dikaji secara simultan dalam penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menggunakan satu pendekatan. Oleh karena itu, kontribusi teoritis dari artikel ini adalah menunjukkan bahwa pencegahan fraud memerlukan pendekatan multi-dimensi yang

melibatkan kebijakan (GCG), struktur kontrol (pengendalian internal), serta aspek psikososial (fraud triangle).

Dengan menyandingkan temuan dalam artikel ini dengan enam penelitian relevan yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan sistem pengendalian internal merupakan fondasi utama dalam menciptakan sistem pencegahan fraud yang efektif dan berkelanjutan. GCG yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh kontrol internal yang kuat hanya akan menghasilkan struktur kebijakan normatif yang tidak memiliki daya deteksi ataupun tindakan korektif terhadap potensi kecurangan.

Sebaliknya, pengendalian internal tanpa arah kebijakan yang jelas dari prinsip-prinsip tata kelola berisiko menjadi mekanisme yang lemah, mudah disalahgunakan, atau tidak konsisten dalam penerapannya. Oleh karena itu, sinergi antara keduanya bukan hanya opsional, tetapi merupakan suatu kebutuhan sistemik untuk membangun organisasi yang bebas dari praktik fraud.

Lebih lanjut, dari hasil analisis dan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu, ditemukan bahwa pengawasan manajemen dan kepemimpinan yang beretika berperan sebagai motor penggerak utama dalam memastikan kedua komponen tersebut berjalan selaras dan berfungsi sebagaimana mestinya. Tanpa adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi, baik penerapan GCG maupun pelaksanaan sistem pengendalian internal akan menemui hambatan dalam implementasi.

Pemimpin yang memiliki integritas tinggi tidak hanya akan menegakkan aturan, tetapi juga menjadi teladan dalam membangun budaya organisasi yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab moral terhadap pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan hasil temuan studi (Purnamasari, n.d.) yang menekankan pentingnya faktor manusia dalam keberhasilan sistem pencegahan fraud, khususnya melalui pelatihan integritas dan etika profesi bagi auditor serta pimpinan unit kerja.

Kemudian, hasil temuan juga menggarisbawahi bahwa konteks organisasi, apakah itu di sektor publik maupun sektor privat, memang menunjukkan perbedaan dalam hal struktur, sumber daya, dan kerangka regulasi, namun prinsip dasar dalam membangun sistem anti-fraud tetap sama dan universal.

Prinsip-prinsip seperti transparansi dalam pelaporan, akuntabilitas atas penggunaan sumber daya, serta sistem evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan harus menjadi komponen inti dari setiap kebijakan anti-kecurangan, tanpa memandang jenis lembaganya. Dalam penelitian (Suci Rahmadani & Sugiarto, n.d.) meskipun objek kajiannya berada pada ranah pemerintahan desa, prinsip-prinsip GCG tetap berlaku dan menunjukkan hasil yang positif ketika diintegrasikan dengan

pengendalian internal yang akurat. Hal ini memperlihatkan bahwa adaptasi GCG bersifat fleksibel dan dapat diterapkan dalam berbagai skala organisasi selama nilai-nilai dasarnya tidak diabaikan.

Kontribusi lain dari artikel ini adalah kemampuannya dalam memperluas ruang lingkup diskusi ilmiah melalui penggunaan pendekatan multi-teori dan multi-sektor. Tidak hanya mendasarkan analisis pada kerangka kerja COSO sebagai fondasi sistem pengendalian internal, artikel ini juga mengaitkan temuannya dengan *fraud triangle theory* untuk menjelaskan latar belakang psikososial terjadinya kecurangan. Pendekatan ini jarang dilakukan secara bersamaan dalam studi terdahulu yang cenderung hanya fokus pada salah satu pendekatan teoritis saja. Selain itu, dengan mengkaji berbagai penelitian lintas sektor (perusahaan swasta, BUMN, organisasi publik, dan lembaga desa), artikel ini tidak hanya memberikan pandangan yang luas secara akademik, tetapi juga menawarkan relevansi praktis yang tinggi bagi pengambil kebijakan di berbagai jenis institusi.

Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memperkuat hasil temuan dari studi-studi sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi yang berarti dalam literatur mengenai pencegahan fraud. Artikel ini membuktikan bahwa keberhasilan implementasi GCG dan pengendalian internal sangat ditentukan oleh keterpaduan struktur, komitmen manajemen, konteks organisasi, dan kesadaran etis para pelaku di dalamnya. Penerapan kedua komponen tersebut secara terintegrasi bukan hanya akan menghasilkan sistem pencegahan yang efektif, tetapi juga memperkuat reputasi, meningkatkan kepercayaan stakeholder, dan menciptakan budaya organisasi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Conceptual framework

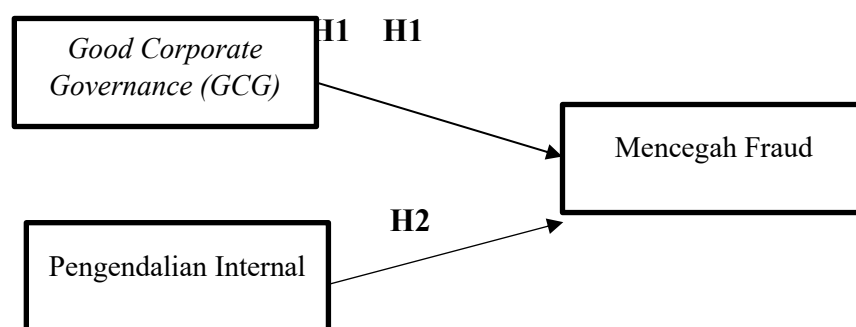


Figure 1: Conceptual Framework

Kerangka konseptual berikut menjelaskan bagaimana *Good Corporate Governance* (GCG), pengendalian internal, dan pencegahan *fraud* berhubungan satu sama lain. Penemuan ini didasarkan pada literatur dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Selain 3 variabel diatas yang mempengaruhi Pencegahan Kecurangan, terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi diantaranya adalah :

X1 : Kinerja Perusahaan Suci Rahmadani & Sugiarto (n.d.)

X2 : Kesadaran Anti-Fraud Nadia et al. (n.d.)

X3 : Integritas Manajemen (Nova Sucisari, 2019)

SIMPULAN

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) seperti transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan manajemen terbukti memiliki kontribusi yang signifikan dalam mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Namun, efektivitas GCG tidak akan optimal apabila tidak diiringi dengan sistem pengendalian internal yang kuat dan terintegrasi. Meskipun secara teoritis GCG dirancang untuk menciptakan tata kelola yang adil dan transparan, di lapangan masih banyak organisasi di Indonesia yang belum mampu menerapkan prinsip tersebut secara menyeluruh. Salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya fungsi audit internal dan kurangnya integrasi antara GCG dengan sistem pengendalian internal.

Penelitian dan studi sebelumnya menegaskan bahwa pengendalian internal menjadi elemen penting dalam memperkuat penerapan GCG dan mencegah fraud. Kerangka COSO menjadi rujukan penting dalam merancang sistem pengendalian internal yang komprehensif, mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Selain itu, teori segitiga fraud menunjukkan bahwa kelemahan pengawasan menciptakan peluang terjadinya kecurangan. Dalam konteks ini, peran pimpinan organisasi sangat menentukan keberhasilan implementasi GCG dan sistem pengendalian internal secara berkelanjutan. Dengan demikian, sinergi antara kedua aspek ini sangat krusial dalam membangun organisasi yang tahan terhadap risiko kecurangan dan menjaga kepercayaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Santoso, R., Rustandi, N., Sangga Buana, U., & Tinggi Ilmu Ekonomi STAN Bandung, S. I. (2024). Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud). *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 3(4).
- Suci Rahmadani, & Sugiarto. (n.d.). *Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa*.
- Fadilah, S., Maemunah, M., Nurrahmawati, Lim, T. N., & Sundary, R. I. (2019). Forensic accounting: Fraud detection skills for external auditors. *Polish Journal of Management Studies*, 20(1), 168–180. <https://doi.org/10.17512/pjms.2019.20.1.15>
- Fitriana, Agus Santoso, R., & Rustandi, N. (2024). Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud). *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 3(4).
- Harahap, A. R. (2024). Literature Review: Pengaruh Peran Audit Internal , Sistem Pengendalian Internal dan Audit Manajemen Terhadap Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(5), 2985–2992. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i5.3074>
- IRS. (2024, March 28). *IRS Criminal Investigation releases updated COVID fraud statistics on 4th anniversary of CARES Act; nearly \$9 billion investigated*. IRS.
- Lestari, R., Nurfahmiyati, N., Oktaroza, M. L., & Putra, B. (2021). Construct The Management Accounting Information System Quality to Improve Gcg Implementation. *MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 37(1). <https://doi.org/10.29313/mimbar.v37i1.7763>
- Miranda Anzasmara Pasaribu. (2021). *PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCCE DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PT. PARSINTAULI KARYA PERKASA*.
- Nadia, F. A., Sukarmanto, E., Purnamasari, P., Akuntansi, P., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (n.d.). *Prosiding Akuntansi Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Kecurangan Influence of Internal Control and Good Corporate Governance on Fraud Prevention*.

Nova Sucisari. (2019). *SKRIPSI NOVA SUCISARI*.

Nugroho, D. H., & Afifi, Z. (2022). PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD. *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2(3), 301–316.
<https://doi.org/10.53363/yud.v2i3.42>

Purnamasari, P. (n.d.). *Fraud Prevention: The Forensic Auditors' Knowledge and Religiosity Perspectives*. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v0i0.1>

Sitti Fitratul Jannah. (2016). *PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DI BANK PERKREDITAN RAKYAT (STUDI PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI SURABAYA)*.

Vallabhaneni, R. (2024). Enhancing Internal Controls with the COSO Framework: Addressing Deficiencies and Ensuring Regulatory Compliance. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.4944856>